

LAPORAN KINERJA

TAHUN
2023

**PUSAT PENGKAJIAN & PENGEMBANGAN
SISTEM KEARSIPAN
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**



Ikhtisar Eksekutif



Sebagai bagian dari struktur organisasi Arsip Nasional RI berdasarkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan harus memberikan pelaporan mengenai akuntabilitas dan kinerja yang akan menjadi bagian dari laporan akuntabilitas dan kinerja dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Pelaporan tersebut didasarkan pada Perjanjian Kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan pada Tahun 2023. Laporan Kinerja ini selain bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pada pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih guna mencapai visi Arsip Nasional RI melalui fungsi antara lain : (1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan

dan sistem informasi kearsipan, (2) Penyiapan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan, (3) penyiapan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Pusjibang Siskar) ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2023. Laporan ini disusun berdasarkan capaian kinerja baik fisik maupun anggaran yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Laporan Kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 ini memaparkan hasil pelaksanaan kegiatan dari 6 (enam) program yang telah ditetapkan. Pada hakekatnya, seluruh kegiatan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kendala yang harus ditangani dengan baik.

Kami menyadari tentunya masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja. Oleh karena itu kami senantiasa mengharapkan saran dan masukan bagi penyusunan rencana maupun pelaksanaan kegiatan. Kami juga berterima kasih terhadap semua pihak yang telah berperan serta aktif dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kalangan luas, terutama pihak-pihak yang terkait.

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan,



Dr. Muhammad Sumitro, SH. MAP

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Gambaran Umum.....	2
1.3	Struktur Organisasi.....	5
1.4	Isu Strategis Organisasi.....	6
1.5	Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan.....	7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1	Rencana Strategis.....	9
2.2	Rencana Kinerja Tahunan.....	9
2.3	Perjanjian Kinerja.....	10
2.4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.....	11
2.5	Rencana Penarikan Dana.....	12
2.6	Metode Pengukuran.....	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1	Capaian Kinerja Rencana Strategis.....	17
3.2	Capaian Kinerja Organisasi.....	17
3.3	Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	18
3.4	Capain/Realisasi Anggaran.....	19
3.5	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Internal.....	23
3.6	Prestasi.....	25

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	33
4.2 Saran.....	33

Lampiran-lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya pelaporan terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan untuk mengetahui kesesuaian dalam pelaksanaan visi dan misi nasional dengan visi dan misi penyelenggaraan kearsipan.

Saat ini, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan telah bergeser dari output menjadi outcome. Melalui perubahan ini, akuntabilitas kinerja tidak semata-mata diukur dari angka melainkan dampak yang diharapkan dapat dicapai.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan organisasi yang dilaksanakan secara periodik setiap tahunnya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut disampaikan ke dalam laporan yang disebut dengan Laporan Kinerja.

Penyusunan laporan ini tentunya tidak terlepas dari tugas fungsi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia. Sebagaimana dijabarkan pada Pasal 68 bahwa Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan;
2. Penyiapan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan; dan
3. penyiapan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan.

1.2 Gambaran Umum

Dasar pembuatan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI;
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023;
4. Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pusat Pengkajian dan Pengembangan sistem Kearsipan Tahun Anggaran 2023; dan
5. Nota Dinas Sekretariat Utama Nomor : PR.09.01/6/2024 tanggal 3 Januari 2024 Hal: Permintaan Laporan Triwulan IV, Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2023.

Seluruh daya upaya pembangunan nasional secara semesta dan berencana diarahkan untuk mencapai tujuan nasional yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai penuntun untuk mencapai tujuan nasional tersebut diperlukan satu visi nasional yang mepau mempersatukan pola pikir dan gerak langkah seluruh rakyat, yaitu mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencanangkan empat pilar visi Indonesia tahun 2045 yang dapat menjadi arah pembangunan nasional, yaitu:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
3. Pemerataan pembangunan; dan
4. Ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pembangunan merupakan jalan perubahan yaitu jalan ideologis yang bersumber

pada Proklamasi, Pancasila, dan Pembukaan UUD 1945. proklamasi dan pancasila menegaskan jati diri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Pencapaian tujuan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan tujuan dan visi di atas tentunya memerlukan suatu rencana strategis yang disusun secara seksama dengan mengedepankan prinsip kebersamaan oleh segenap komponen penyelenggara negara dan masyarakat. Penyelenggaraan kearsipan nasional, baik pembangunan maupun proses penyelenggaraannya, harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi kearsipan nasional sehingga peran dan fungsi arsip sebagai alat bukti yang sah, bukti akuntabilitas kinerja, identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dioptimalkan untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berperadaban tinggi.

Visi Kearsipan nasional pada hakekatnya adalah mendukung pencapaian visi Presiden Republik Indonesia di bidang kearsipan, yang secara spesifik adalah menjadikan arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa serta pusat referensi dan sumber informasi terpercaya dan sebagai Simpul Pemersatu Bangsa pada Tahun 2024 dengan misinya:

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan.
2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi.
3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah.
4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, rekomendasi kebijakan dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Namun pada pelaksanaannya, penyelenggaraan kearsipan nasional yang berjalan hingga saat ini, masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi.

Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan kearsipan nasional dapat dirumuskan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a. Penyelenggaraan kearsipan nasional saat ini belum bersifat terpadu, sistemik, dan komprehensif yang semuanya tidak terlepas dari pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan penyelenggara negara, sehingga kualitas pelayanan publik masih memprihatinkan;
- b. Kearsipan masih belum dapat optimal dalam mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara, khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan belum dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu;
- c. Ketentuan dan pengaturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disiapkan kebijakan sistem kearsipan nasional untuk dapat menjadi pedoman tata kelola dan tata laksana dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional;
- d. Ketersediaan sumber daya penyelenggaraan kearsipan, baik sumber daya manusia, prasarana dan sarana, maupun sumber daya kearsipan lainnya masih belum memadai.

Perkembangan TIK dalam kerangka industri 4.0 dan society 5.0 turut juga memengaruhi penyelenggaraan kearsipan, dimana adanya tuntutan untuk pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sehingga kegiatan kearsipan akan bertransformasi ke arah digital. Guna

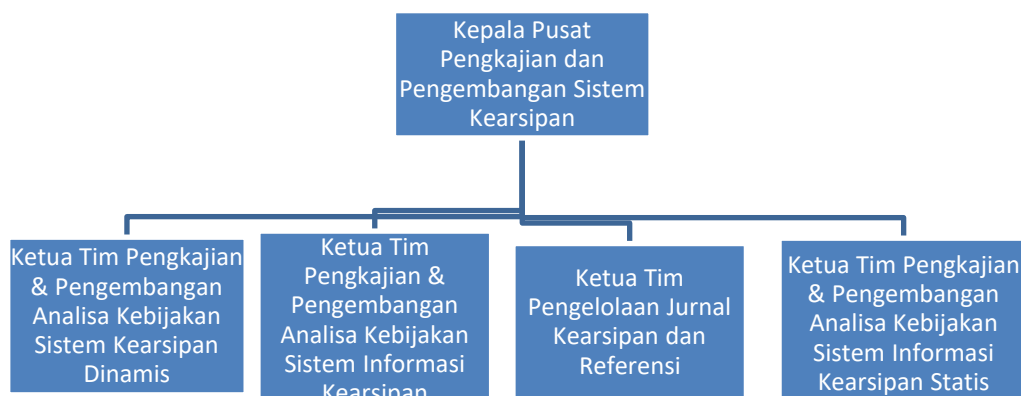
mendukung hal tersebut maka perlu adanya prioritas pelaksanaan program kerja sesuai dengan tugas fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang ada. Adapun untuk tahun 2023, prioritas kebijakan yang disusun adalah:

1. Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan.
2. Kebijakan Pengarsipan Media Sosial.
3. Kebijakan Efektivitas Peraturan dalam rangka Transformasi Digital Kearsipan.
4. Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip K/L yang pindah Ibukota Negara
5. Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan

Selain rancangan kebijakan tersebut, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan menyelenggarakan penerbitan jurnal kearsipan volume 18 dengan 2 (dua) terbitan untuk tahun 2023. Penerbitan jurnal dilaksanakan melalui review oleh tim jurnal dan mitra bestari. Hasil dari artikel jurnal tersebut dideseminasikan kepada masyarakat luas khususnya pemerhati arsip.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia berada dibawah Kedeputan Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan sebagai berikut :



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Tugas dan Fungsi organisasi

- a. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan.
- b. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis;
 - b. Penyiapan pemberian bimbingan di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis; dan
 - c. Penyiapan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan sistem kearsipan dan sistem informasi kearsipan dinamis dan statis.

1.4 Isu Strategis Organisasi

Saat ini jumlah pegawai Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan sebanyak 11 orang, yang terdiri dari Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, Pejabat Fungsional Arsiparis dan Analis Kebijakan. Namun ada 2 orang jabatan analis kebijakan sedang melanjutkan Pendidikan strata dua sebagai Tugas Belajar, sehingga saat ini pegawai yang aktif ada 8 orang. Untuk meningkatkan optimalisasi kinerja di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan maka diperlukan tambahan SDM sesuai dengan peta jabatan.

1.5 Sistematisasi dan Ruang Lingkup Pelaporan

Ruang lingkup laporan kinerja ini mencakup laporan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem

Kearsipan selama kurun waktu 1 (satu) tahun mulai bulan Januari s.d. bulan Desember Tahun Anggaran 2023. Penyajian Laporan Kinerja ini terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif.

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Gambaran Umum
- 1.3 Struktur Organisasi
- 1.4 Isu Strategis Organisasi
- 1.5 Sistematika dan Ruang Lingkup Pelaporan

Bab II Perencanaan Kinerja

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan
- 2.3 Perjanjian Kinerja
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
25. Rencana Penarikan Dana
- 2.6 Metode Pengukuran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis
- 3.2 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja
- 3.4 Capaian/ Realisasi Anggaran
- 3.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Internal
- 3.6 Prestasi

Bab IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

Berpedoman pada Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2023
Sasaran Strategis : Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Kearsipan	Jumlah Rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau Digunakan	6 Rekomendasi

Rencana Kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Pada Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2023 sebagaimana Petikan DIPA Nomor SP DIPA-087.01-45044/2023 tanggal 21 Desember 2022.

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.516,773,000,-

Indikator Kinerja Program pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 adalah meningkatnya kepatuhan terhadap kebijakan kearsipan. Dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan tersebut ada 1 (satu) Klasifikasi Rincian Output (KRO) kegiatan yaitu Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem kearsipan pada Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2023. Berikut adalah rencana kinerja Pusat Pengkajiandan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan
Tahun 2023



No	Kegiatan /KRO/RO	Pagu (Rp)	Pagu Revisi
ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan	1,516,773,000	735,602,000
051	Penyusunan Kebijakan Kearsipan	1,216,218,000	506,622,000
052	Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan	300,555,000	228,980,000

Alokasi anggaran Pusjibang Siskar tahun 2023 pagu awal sebesar Rp.1,516,773,000 (satu milyar lima ratus juta enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan pada bulan Januari 2023 terdapat disposisi dari Depurti Bidang IPSK nota dinas Sekretaris Utama Nomor : PR.04.00/845/2022 tanggal 29 Desember 2023 Perihal Revisi Buka Blokir Anggaran pada DIPA Tahun 2023 Melalui nota dinas tersebut, anggaran Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan yang masuk dalam kategori Automatic Adjustment (AA) adalah sebesar 70%.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun 2023 berdasarkan Renstra Arsip Nasional RI sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN			
No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	1. Indeks Kualitas Kebijakan	75 Indeks
2.	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	2. Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau digunakan	6 Rekomendasi

Kegiatan Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional	Anggaran Rp1.516.773.000
Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan,  Dr. Andi Kasman, S.E., MM	Jakarta, 26 Desember 2022 Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan,  Dr. Muhammad Sunjito, SH. MAP

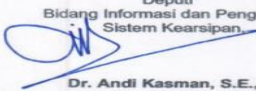
Pada tanggal 31 Oktober 2023 ada Nota Dinas Nomor : PR.01/747/2023 dari Sekretaris Utama perihal Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dikarenakan ada perubahan anggaran dari Rp. 1.516.773.000 menjadi Rp. 735.602.000

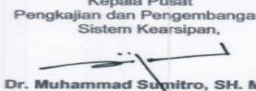
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN**

No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan	1. Indeks Kualitas Kebijakan	75 Indeks
2.	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional	2. Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau digunakan	6 Rekomendasi

Kegiatan
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional

Anggaran
Rp 735.602.000,00


Deputi
Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Dr. Andi Kasman, S.E., MM

Jakarta, 01 November 2023
Kepala Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Dr. Muhammad Sumitro, SH, MAP

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Rincian Output	Target	RENCANA AKSI				Kendala	Tindak Lanjut	Ket
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Penyelenggaraan Kearsipan	Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	75 indeks	identifikasi populasi kebijakan	pengumpulan bukti dukung nominal kebijakan	Analisis dan penilaian mandiri	Finalisasi : pleno penilaian indeks kualitas kebijakan			
2	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau digunakan	6 Rekomendasi Kebijakan	1. Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan	Penyusunan desain kebijakan	1 Konsultasi Kebijakan	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan	Uji Publik dan Finalisasi		
				2. Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial	Penyusunan desain kebijakan	1 Konsultasi Kebijakan	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan	Uji Publik dan Finalisasi			
				3. Penyusunan Kebijakan Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital	Penyusunan desain kebijakan	1 Konsultasi Kebijakan	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan	Uji Publik dan Finalisasi			
				4. Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip K/L yang Pindah Ibukota Nusantara	Penyusunan desain kebijakan	1 Konsultasi Kebijakan	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan	Uji Publik dan Finalisasi			
				5. Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	Penyusunan desain kebijakan	1 Konsultasi Kebijakan	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan	Uji Publik dan Finalisasi			
				6. Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan	1 Rapat Redaksi	1 Penilaian Artikel Jurnal	1 Rapat Redaksi	1 Penilaian Artikel Jurnal			
				2 Registrasi DOI (Digital Object Identifier)			2 Penilaian Artikel Jurnal	2 Sosialisasi Jurnal Kearsipan			
				3 Integrasi dengan OJS			3 Studi banding dan sosial	3 Seminar Internasional Jurnal Kearsipan			
				4 Penilaian Artikel Jurnal				4 Pembahasan Hasil			
				5 Rapat Persiapan Diseminasi Jurnal				5 Penyebarluasan			
								6 Rapat Evaluasi dan Pelaporan			

Jakarta, 2 Maret 2023
Kepala Pusat
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Dr. Muhammad Sumitro, S.H., MAP

2.5 RENCANA PENARIKAN DANA

RENCANA PENARIKAN DANA															
Column1 -	Column2 -	Column3 -	Column4 -	Column5 -	Column6 -	Column7 -	Column8 -	Column9 -	Column10 -	Column11 -	Column12 -	Column13 -	Column14 -	Column15 -	Column16 -
KODE	Uraian RO/Komponen/Akun/Detail	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL	KET (AUTOMATIC ADJUSTMENT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
087.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional														
3629	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan														
3629.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan														
3629.ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan														
051	Penyusunan Kebijakan Kearsipan														
A	Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan														
521211	Belanja Bahan														
	Penyusunan Desain Kebijakan														
	- Konsumsi Rapat		1.952.940	1.500.000	2.997.060	1.112.600		2.937.400							
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan														
	- Konsumsi Rapat								1.875.000	7.500.000					
	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan														
	-Konsumsi Rapat										1.875.000				
	Pelaksanaan Uji Publik														
	-Konsumsi Rapat												4.500.000		
522151	Belanja Jasa Profesi														
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan														
	Uji Publik							1.800.000							
	Uji Publik												3.400.000		
524.111	Belanja perjalanan biasa														
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan														
								31.484.000							
524.114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
	-Rapat Fullboard										74.316.000	71.922.000			AA
		0	1.952.940	1.500.000	2.997.060	1.112.600	1.800.000	34.421.400	1.875.000	81.816.000	73.797.000	7.900.000	0	209.172.000	
B	Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial														
521211	Belanja Bahan														
	Penyusunan Desain Kebijakan														
	-Konsumsi Rapat		1.875.000	1.350.000											
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan														
	-Konsumsi Rapat								1.500.000	1.500.000					
	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan														
087.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional														
3629	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan														
	-Konsumsi Rapat										1.500.000				
	Uji Publik														
	-Konsumsi Rapat											2.050.000			
522151	Belanja Jasa Profesi														
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan									6.800.000					
	Pelaksanaan Uji Publik												3.400.000		
524.111	Belanja perjalanan biasa														
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan											96.392.000			AA
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														
	-Transportasi Lokal										1.350.000				
524.114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
	-Paket Fullboard Meeting							67.848.000							
		0	1.875.000	1.350.000	0	0	67.848.000	1.500.000	8.300.000	2.850.000	96.392.000	5.450.000	0	185.565.000	
C	Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan														

087.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional																		
3629	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan																		
C	Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan																		
521211	Belanja Bahan																		
	Penyusunan Desain Kebijakan																		
	- Konsumsi Rapat			1.425.000	1.500.000														
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan																		
	- Konsumsi Rapat							308.000	1.500.000	3.000.000									
	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan																		
	- Konsumsi Rapat												2.692.000						
	Uji Publik																		
	- Konsumsi Rapat																	1.875.000	
522151	Belanja Jasa Profesi																		
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan										5.400.000							3.400.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																		
	-Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan								39.385.000				59.406.000						AA
087.CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional																		
3629	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan																		
524.113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																		
	-Transportasi Lokal												3.150.000						
524.114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota																		
	-Paket Fullboard Meeting																71.922.000		AA
		0	1.425.000	0	1.500.000	0	308.000	40.885.000	8.400.000	5.842.000	131.328.000	5.275.000	0	194.963.000					
D	Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang pindah Ibukota																		
521211	Belanja Bahan																		
	Penyusunan Desain Kebijakan																		
	- Konsumsi Rapat			1.500.000	1.500.000														
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan																		
	- Konsumsi Rapat							1.189.503	1.810.497	6.000.000									
	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan																		
	- Konsumsi Rapat											1.500.000	1.500.000						
	Uji Publik																		
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri																		
	-Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan																261.310.000		AA
522131	Belanja Jasa Konsultan																		
	-Konsultasi Kebijakan																		AA
522151	Belanja Jasa Profesi																		
	Konsultasi Kebijakan												6.800.000						
	Uji Publik																	3.400.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota																		
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan																47.796.000		
		0	0	1.500.000	1.500.000	1.189.503	0	1.810.497	0	14.300.000	410.506.000	5.564.000	0	436.470.000					
E	Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan																		
521211	Belanja Bahan																		
	Penyusunan Desain Kajian/Penelitian																		
	-Konsumsi Rapat			3.000.000															
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan																		
	-Konsumsi Rapat																		

052	Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan																	
A	Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan																	
521211	Belanja Bahan																	
	- Rapat Redaksi	1.470.000						1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.530.000							
521213	Honor Output Kegiatan																	
	-Honor Output Kegiatan															50.800.000		
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya																	
	-Digital Object Identifier									2.500.000								
522151	Belanja Jasa Profesi																	15.000.000
	-Mitra Bestari																	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota																	
	-Pembahasan Penerbitan Jurnal Kearsipan																	71.232.000
B	Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan																	
521211	Belanja Bahan																	
	-Konsumsi Rapat Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan																	
	-Konsumsi Rapat Uji Publik										3.000.000							
	-Konsumsi Rapat																	
522151	Belanja Jasa Profesi																	
	Konsultasi Kebijakan Uji Publik									1.500.000								2.250.000
	Konsultasi Kebijakan Uji Publik																	6.800.000
	Konsultasi Kebijakan Uji Publik																	3.400.000
524111	Belanja perjalanan biasa																	
	Konsultasi Kebijakan																	
	Konsultasi Kebijakan	19.040.000						23.586.000										
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota																	
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan																	59.180.000
052	Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan	0	19.040.000	4.500.000	0	0	23.586.000	1.500.000	8.300.000	1.500.000	3.000.000	64.830.000	0	126.256.000				
A	Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan																	
521211	Belanja Bahan																	
	-Konsumsi Rapat																	
	-Pencetakan						900.000	1.401.400		3.000.000	3.000.000	44.496.000	2.198.600					12.000.000
522151	Belanja Jasa Profesi																	
	-Workshop Penulisan Jurnal											10.200.000						
	Seminar Internasional Jurnal Kearsipan												13.600.000					
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																	
	-Transport Lokal									1.800.000								
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota																	
	Pembahasan Hasil Diseminasi																	
	Pembahasan Hasil Diseminasi	1.470.000	0	0	0	900.000	1.401.400	1.500.000	6.300.000	17.200.000		120.219.000		179.845.000	73.430.600	77.800.000	359.847.000	AA
Total		1.470.000	24.292.940	8.850.000	5.997.060	3.202.103	94.943.400	81.616.897	33.175.000	123.508.000	894.968.000	162.449.600	77.800.000	1.512.273.000				

Page 2

2.6 Metode Pengukuran

Sebagai salah satu upaya mendukung keberhasilan pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional sesuai Dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024. Dalam melakukan pengukuran IKK Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan mengacu pada Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pengampu Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang digunakan sebagai indeks komposit dalam penilaian Reformasi Birokrasi di seluruh instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur kualitas kebijakan diperlukan pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengukuran secara tepat dan akurat. Metode pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan mengacu pada Surat Edara Lembaga Administrasi Negara Nomor : 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan.

Pengukuran kualitas kebijakan dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disesuaikan dengan proses yang terdiri atas :

- a. Instrumen perencanaan kebijakan; dan
- b. Instrumen evaluasi kemanfaatan kebijakan.

Adapun tahapan pengukuran kualitasn kebijakan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pengukuran mandiri (*self asesment*);
- b. Pengecekan kelengkapan isian (*desk analysis*);
- c. Penilaian tahap I;
- d. Validasi penilaian
- e. Penilaian tahap II; dan
- f. Diseminasi praktik baik hasil pengukuran IKK

Pengukuran Kualitas Kebijakan dilakukan dengan menggunakan metode sampling dari seluruh kebijakan Yang diterapkan oleh K/L/D dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran. Untuk menentukan jumlah kebijakan yang akan diukur dalam metode sampling digunakan rumus sebagai berikut :

$$n\sqrt{N+1}$$

keterangan :

N = jumlah kebijakan yang menjadi populasi pengukuran

N = jumlah sampel kebijakan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung tujuan penyelenggaraan kearsipan, Pusat Pengkajian dan pengembangan system kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pengendalian di bidang pengkajian dan pengembangan system kearsipan di lingkungan Arsip Nasional RI dengan mengoptimalkan perannya dalam mendukung Arsip Nasional RI dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah periode tahun 2020-2024.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pusat Data dan Informasi. Pengelolaan kinerja dimulai dari penetapan target yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran atas capaian target beserta monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilakukan secara berkala melalui aplikasi E-Monev dan SMART meliputi proses penginputan, validasi, dan reвью data input. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kerja yang terjadi serta tindakan perbaikannya yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

a. Capaian Kinerja Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan

Hasil penilaian indeks Kualitas Kebijakan diumumkan pada bulan Desember 2023, dengan nilai yang didapatkan adalah 78,96. Penilaian indeks Indeks Kualitas Kebijakan ini terdiri dari 2 dimensi, 4 sub dimensi, 13 indikator dan 39 pertanyaan.



Sumber : LAN RI, 2023

b. Capaian Output berdasarkan KRO/RO

Capaian kinerja Program, Kinerja Kegiatan, Prioritas Nasional, Output RO/RO) untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis program/kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai.

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Capaian Kinerja

Secara keseluruhan seluruh target output pada tahun 2023 telah dilaksanakan.

Adapun kegiatan yang didukung dengan anggaran sebesar Rp 735.602.000 (Tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua ribu rupiah). Sampai dengan akhir Desember 2023, anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 124.088.000
- b) Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp 86.198.000
- c) Efektivitas Kebijakan dalam rangka Transformasi Digital Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 64.795.000

- d) Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang pindah ke Ibukota Nusantara dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 98.375.000
- e) Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 121.355.000
- f) Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.932.000
- g) Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 95.859.000

Seluruh kegiatan di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan yang telah dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Adapun rincian target dan realisasi/capaian perjanjian kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Perjanjian Kinerja 2023

Masing-masing indikator kinerja program memiliki nilai skoring penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.x

IKP, Target, Realisasi, Nilai/Indeks, Sumber Data

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Nilai/Indeks	%	Sumber Data
Indeks Kualitas Kebijakan	75	78,96	Baik		Kementerian PAN RB

3.4 Capaian / Realisasi Anggaran

Adapun terkait dengan realisasi fisik dan anggaran yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi fisik dan Anggaran Pusat Pengkajian Pengembangan dan Sistem Kearsipan
Sampai dengan Desember 2023

Kode	Program/Kegiatan /KRO/RO	Pagu	Target Output	Capaian Output		Realisasi Anggaran	
		(Rp)	(Volume)	(Volume)	(%)	(Rp)	(%)
CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	735,602,000		0	0,00	724,200,747	98,45%
ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan	735,602,000	6 Rekomendasi	0	0,00	724,200,747	98,45%
051	Penyusunan Kebijakan Kearsipan	494,811,000		0	0,00	492,723,747	99,58%
052	Penyelenggaraan jurnal kearsipan	240,791,000		0	0,00	231,477,000	96.13 %

Program kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Tahun Anggaran 2023, dalam kurun waktu Oktober s.d. Desember 2023 telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut ini:

1. Penyusunan Kajian Kearsipan

a. Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan

Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan ini dilakukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintah yang terpadu secara nasional, dan untuk mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Adapun realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 123,204,823 dari pagu anggaran Rp. 124,088,000 atau sebesar 99.29 %.

Sementara realisasifisik sebesar 95,00%. Dalam hal kegiatan pada triwulan IV, telah dilaksanakan Penulisan Draft Penyusunan Kebijakan dan Kegiatan Uji Publik.

b. Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial

Pelaksanaan kebijakan pengarsipan media sosial yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan sebagai langkah Arsip Nasional RI untuk merekam dan menyimpan partisipasi public serta kelak menyediakan akses berkelanjutan terhadap arsip interaksi publicdan agensi pemerintah tersebut,

maka perlu penyusunan suatu kebijakanpengarsipan terhadap media sosial yang Lembaga/kementerian atau agensi pemerintah pusat dan daerah Kelola, terutama melalui unit kerja hubungan masyarakat, sehingga dalam transformasi digital mendapatkan bukti pengalaman terbaiknya dalam pengarsipan media sosial. Realisasi anggaran sampai Triwulan IV ini adalah sebesar Rp. 86,198,000 dari alokasi anggaran Rp. 86,198,000 atau sebesar 100.00. Sementara realisasi fisik mencapai 98,00%. Dalam hal kegiatanpada triwulan IV, telah dilaksanakan kegiatan Penulisan Draft Penyusunan Kebijakan dan Kegiatan Uji Publik.

c. Penyusunan Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan

Pelaksanaan transformasi digital bidang kearsipan ini perlu diperkuat dengan penetapan kebijakan teknis yang mendefinisikan berbagai substansi dalam peraturan perundang undangan yang berlaku. Melalui peraturan teknis diharapkan bahwa transfomasi digital bidang kearsipan dapat diterjemahkan dan diimplementasikan dengan baik bagi para stakeholder kearsipan. setidaknya dapat memberikan gambaran bagaimana implementasi transformasi digital bidang kearsipankhususnya terkait dengan SRIKANDI.

Hal ini masih merupakan satu aspek dari visi besar transformasi bidang kearsipan yang telah ditargetkan ANRI pada tahun 2024. Oleh karena itu untuk dapat memberikan informasi yang utuh terkait dengan penyelenggaraan transformasi digital yang telah dilaksanakan serta untuk memperbaiki dan meningkatkan aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, makadibutuhkan pengukuran efektifitas kebijakan bidang kearsipan dalam rangka Transformasi Digital Kearsipan. Realisasi anggaran sampai Triwulan IV ini sebesar Rp. 64,367,576 dari pagu anggaran Rp 64,795,000 atau sebesar 99,34%. Sementara realisasi fisik sebesar 85,00%.

Dalam hal kegiatan pada triwulan IV, telah dilaksanakan kegiatan Penulisan Draft Kebijakan sampai pada BAB 4.

d. Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip K/L yang pindah Ibukota Negara

Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang pindah Ibukota Negara mempunyai Urgensi pemindahan ibukota ini, dilaksanakan guna mendukung pemerataan bagi daerah di luar Jawa. Sebagaimana yang diketahui, bahwa perekonomian sampai dengan saat ini terpusat di Pulau Jawa dan Jakarta sehingga mengakibatkan kesenjangan ekonomi di luar Pulau Jawa. Selain itu, terdapat hasil kajian yang menyimpulkan bahwa Jakarta tidak dapat mengemban peran sebagai Ibu Kota Negara karena adanya penurunan kondisi lingkungan, penambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali yang mengakibatkan turunnya tingkat kenyamanan hidup di Ibu Kota. Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai instansi yang memiliki tugas sebagai Lembaga kearsipan nasional, perlu untuk melaksanakan penyelamatan terhadap arsip Kementerian/Lembaga yang akan pindah ibukota. Sampai dengan Triwulan IV ini realisasi anggaran sebesar Rp 97,925,000 dari pagu anggaran Rp 98,375,000 atau sebesar 99,54%. Sementara realisasi fisik sebesar 95,00%. Dalam hal kegiatan pada triwulan IV, telah dilaksanakan Penulisan Draft Kebijakan dan Kegiatan Uji Publik.

e. Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu data Indonesia merupakan kebijakan tata Kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, satu data dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi akses dan berbagi pakai baik instansi pusat maupun daerah. Sampai dengan saat ini, satu data Indonesia melakukan pengelolaan data bagi geospasial. Hal tersebut karena data geospasial telah memiliki standar data yang dibutuhkan sebagai wali data. Dalam konteks kearsipan, khasanah arsip yang setiap hari tercipta dari berbagai kegiatan penyelenggaraan negara merupakan representasi dari big data yang telah diolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang kearsipan. Data kearsipan harus memenuhi standar data, data yang dihasilkan produsen data harus memiliki metadata, data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah interoperabilitas data serta harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Oleh karena itu diperlukan penyusunan kebijakan terkait dengan satu data kearsipan.

Sampai dengan Triwulan IV ini realisasi anggaran sebesar Rp. 121,028,348 dari pagu anggaran sebesar Rp. 121,355,000 atau 99,73%. Sementara realisasi fisik sebesar 98,00%. Dalam hal kegiatan pada triwulan IV, telah dilaksanakan kegiatan Penulisan Draft Kebijakan dan Kegiatan Uji Publik.

2. Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan

a. Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan

Jurnal Kearsipan sebagai sarana komunikasi para ahli kearsipan, praktisi kearsipan, pemerhati kearsipan, mahasiswa bidang kearsipan dan pejabat fungsional arsiparis juga dapat terus memacu perkembangan dan kemajuan dunia kearsipan sebanding dengan kemajuan dan perkembangan informasi termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan informasi yang tersimpan dalam berbagai bentuk media komunikasi. Secara tidak langsung kemajuan dan perkembangan penelitian, pengkajian dan pengembangan bidang kearsipan dapat memberi andil dalam usaha-usaha pelestarian arsip sehingga visi dan misi Arsip Nasional RI dalam melestarikan arsip sebagai memori kolektif bangsa dan simpul pemersatu bangsa dapat tercapai. Pada triwulan IV ini realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 143,632,000 dari pagu anggaran Rp. 144,932,000 atau sebesar 99,10%. Sementara realisasi fisik mencapai 98,00%. Sementara dalam hal kegiatan pada triwulan IV, telah dilaksanakan review artikel jurnal Tahun 2023.

b. Diseminasi Jurnal Kearsipan

Diseminasi merupakan penyebaran ide maupun gagasan yang dalam hal ini adalah terkait dengan jurnal kearsipan.

Diseminasi Jurnal Kearsipan dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- 1) Akreditasi Jurnal Kearsipan;
- 2) Workshop Penulisan Jurnal Kearsipan; dan
- 3) Seminar Internasional Jurnal Kearsipan (2nd ISDRA).

Realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 87,845,000 dari pagu anggaran Rp. 95,859,000 atau sebesar 91,64% Sementara realisasi fisik sebesar 98,00%.

Sementara dalam hal kegiatan, telah dilaksanakan rapat koordinasi dalam rangka diseminasi jurnal kearsipan.

3.5 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Internal

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dimaksudkan sebagai tolak ukur kesesuaian dalam pelaksanaan program kerja. Selain itu evaluasi juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun hasil evaluasi terkait kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hambatan	Tindak Lanjut Hambatan
1	Kebijakan Kearsipan		
	Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan	1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian waktu. 2. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Kurang"	Berusaha mencari waktu yang tepat dalam koordinasi dengan Narasumber
	Kebijakan Pengarsipan Media Sosial	1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian waktu. 2. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Kurang"	Berusaha mencari waktu yang tepat dalam koordinasi dengan Narasumber
	Kebijakan Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan	1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian waktu. 2. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Kurang"	Berusaha mencari waktu yang tepat dalam koordinasi dengan Narasumber

Kebijakan Percepatan Penataan Arsip K/L yang pindah Ibukota Negara	1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian waktu. 2. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Kurang"	Berusaha mencari waktu yang tepat dalam koordinasi dengan Narasumber
Kebijakan Satu Data Kearsipan	1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian waktu. 2. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Kurang"	Berusaha mencari waktu yang tepat dalam koordinasi dengan Narasumber

2	Jurnal Kearsipan			
	Penerbitan Kearsipan	Jurnal	"1. Kesulitan Koordinasi dengan narasumber terkait penyesuaian waktu	Berusaha mencari waktu yang tepat dalam koordinasi dengan Narasumber
	Diseminasi Kearsipan	Jurnal	Kesulitan mencari Narasumber "Adanya perubahan proses kerja editor agar tidak tunduk tindih dengan mitra bestari	Sosialisasi dan beradaptasi proses kerja yang baru

3.6 Prestasi

A. Pengukuran Dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan pada Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing program dapat dijabarkan sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	URAIAN	CAPAIAN
Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Penyelenggaraan kearsipan nasional menjadi tanggung jawab ANRI yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip. Kewenangan pemerintah pusat (ANRI) pada bidang kearsipan memiliki peran sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi pijakan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan secara nasional	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Hasil instrument IKK oleh LAN sebesar 78,96 dengan kategori baik <input type="checkbox"/> Hasil output Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan dengan output 6(enam) rekomendasi kebijakan

Sementara hasil capaian kinerja terkait anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN (Rp)		
Program Penyelenggaraan Kearsipan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Penyusunan Kebijakan Kearsipan	Penyusunan Kajian Kearsipan	123.204.823		
			Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan			
			Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial			
			Efektivitas Kebijakan dalam rangka Transformasi Digital Kearsipan			
			Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang pindah Ibukota Nusantara			
			Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan			
			Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan		143.632.000	
		Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan	87.845.000			
		Total				724.200.747

Kegiatan	Triwulan							
	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Anggaran	%
Kajian Kearsipan								
Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan	3.439.000	2,47	9.348.660	6,72	40.987.920	30,15	123.204.823	99,29
Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial	3.225.000	3,62	71.073.000	79,72	72.423.000	81,22	86.198.000	100
Penyusunan Efektivitas Kebijakan dalam rangka Transformasi Digital Kearsipan	1.400.000	2,01	10.380.000	14,89	47.367.576	73,73	64.367.576	99,34
Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang pindah Ibukota Negara	1.500.000	2	4.189.503	5,57	5.689.503	7,57	97.925.000	99,54
Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	19.848.800	14,88	44.237.348	33,15	46.772.848	37,14	121.028.348	99,73
Analisis Kebijakan								
Jurnal Kearsipan								
Penyelenggaraan penerbitan Jurnal Kearsipan	1.470.000	1	1.470.000	1	1.470.400	1	143.632.000	99,10
Diseminasi Jurnal Kearsipan	0	0	2.301.400	2,79	2.301.400	2,35	87.845.000	91,64

Berkaitan dengan capaian realisasi fisik adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kajian Kearsipan

Penyusunan Kajian Strategi Implementasi Penyelenggaraan Kearsipan di Ibu Kota Negara Penyusunan Kajian Strategi Implementasi Penyelenggaraan Kearsipandi IKN ini dilakukan sebagai upaya untuk membuat satu rancangan/desain terkait dengan penyelenggaraan kearsipan, agar segala aktivitas kegiatan pemerintahan di IKN dapat tercapture atau tersampaikan dengan baik, sehingga arsip yang tercipta di IKN oleh K/L dapat mempertahankan nilai keautentikannya dan tentunya akan sesuai dengan konsep IKN yang dibangun, yaitu *full integrated smart city*. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Penyusunan Desain Kajian: dilaksanakan pembahasan dengan stakeholder terkait rancangan desain kajian.
- b. Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan: konsultasi kebijakan diselenggarakan melalui FGD dengan mengundang narasumber pakar dari Universitas Gunadharma dan Bappenas. Sementara itu juga dilakukan konsultasi kebijakan di lokus terpilih yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Selatan dan Maluku Utara.
- c. Pembahasan hasil konsultasi kebijakan yang dilaksanakan dengan mengundang stakeholder terkait untuk merumuskan hasil konsultasi kebijakan
- d. Pelaksanaan uji publik yang dilakukan dengan mengundang narasumber pakar dan Kementerian Kominfo
- e. Finalisasi hasil kajian.

2. Penyusunan Kajian Arsip Aset Nasional

Pelaksanaan kajian aset nasional yang dilakukan oleh Pusat Pengkajiandan Pengembangan Sistem Kearsipan sebagai langkah Arsip Nasional RI untuk melakukan identifikasi terhadap aset nasional dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hankam. Identifikasi tersebut sebagai upaya untuk memberikan jaminan keselamatan asset nasional dalam bidang ekonomi, social, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan :

- a. Penyusunan Desain Kajian: dilaksanakan pembahasan dengan stakeholder terkait rancangan desain kajian.
- b. Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan: konsultasi kebijakan diselenggarakan melalui FGD dengan mengundang narasumber pakar terkait asset bidang pertahanan dan kemanan. Sementara itu juga dilakukan konsultasi kebijakan di lokus terpilih yaitu Bali, Bandung, dan Solo.

- c. Pembahasan hasil konsultasi kebijakan yang dilaksanakan dengan mengundang

stakeholder terkait untuk merumuskan hasil konsultasi kebijakan

- d. Pelaksanaan uji publik yang dilakukan dengan mengundang narasumber pakar terkait asset budaya
 - e. Finalisasi hasil kajian.
3. Penyusunan Kajian Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Penyusunan Kajian Naskah Akademik Revisi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan:
- a. Penyusunan Desain Kajian: dilaksanakan pembahasan dengan stakeholder terkait rancangan desain kajian.
 - b. Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan: konsultasi kebijakan diselenggarakan melalui FGD dengan mengundang narasumber pakar bidang kearsipan. Sementara itu juga dilakukan konsultasi kebijakan di lokus terpilih yaitu Yogyakarta, Solo, Semarang, Sulawesi Selatan.
 - c. Pembahasan hasil konsultasi kebijakan yang dilaksanakan dengan mengundang stakeholder terkait untuk merumuskan hasil konsultasi kebijakan
 - d. Pelaksanaan uji publik yang dilakukan dengan mengundang narasumber pakar bidang kearsipan.
 - e. Finalisasi hasil kajian.
4. Penyusunan Kajian Keamanan Arsip Digital
Kajian Keamanan Arsip Digital disusun dengan tujuan untuk menyusun keamanan fisik dan keamanan informasi yang dibutuhkan dalam transformasi digital kearsipan. sekaligus adaptif dengan perkembangan TIK. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan:
- a. Penyusunan Desain Kajian: dilaksanakan pembahasan dengan stakeholder terkait rancangan desain kajian.
 - b. Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan: konsultasi kebijakan diselenggarakan melalui FGD dengan mengundang narasumber pakar bidang teknologi informasi. Sementara itu juga dilakukan konsultasi kebijakan di lokus terpilih yaitu Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Solo, dan Sumatera Selatan.
 - c. Pembahasan hasil konsultasi kebijakan yang dilaksanakan dengan mengundang stakeholder terkait untuk merumuskan hasil konsultasi kebijakan.
 - d. Pelaksanaan uji publik yang dilakukan dengan mengundang narasumber pakar bidang informasi teknologi
 - e. Finalisasi hasil kajian.

5. Penyusunan Kajian Depo Arsip Elektronik

Kajian Depo Arsip Elektronik disusun sebagai upaya untuk memulai proses pengkajian dan pengembangan mengenai standar dan spesifikasi depo arsip elektronik yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kearsipan tanpa meninggalkan kebutuhan pada ranah manual (tekstual). Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Penyusunan Desain Kajian: dilaksanakan pembahasan dengan stakeholder terkait rancangan desain kajian.
- b. Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan: konsultasi kebijakan diselenggarakan melalui FGD dengan mengundang narasumber pakar. Sementara itu juga dilakukan konsultasi kebijakan di lokus terpilih yaitu Sumatera Barat dan Jawa Timur
- c. Pembahasan hasil konsultasi kebijakan yang dilaksanakan dengan mengundang stakeholder terkait untuk merumuskan hasil konsultasi kebijakan
- d. Pelaksanaan uji publik yang dilakukan dengan mengundang narasumber dari Kominfo.
- e. Finalisasi hasil kajian.

6. Penyusunan Analisis Kebijakan: Penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Standar Metadata Arsip

Dalam penyelenggaraan kearsipan terutama menghadapi transformasi digital di bidang kearsipan dan untuk mempersiapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang telah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (Srikandi) mulai pada 2020 ini, maka perlu adanya penyusunan Rancangan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia (Raperanri) tentang Standar Metadata Arsip Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan:

- a. Penyusunan Desain Kajian: dilaksanakan pembahasan dengan stakeholder terkait rancangan desain kajian.
- b. Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan: konsultasi kebijakan diselenggarakan melalui FGD dengan mengundang narasumber pakar. Sementara itu juga dilakukan konsultasi kebijakan di lokus terpilih yaitu Sumatera Barat dan Jawa Barat
- c. Pembahasan hasil konsultasi kebijakan yang dilaksanakan dengan mengundang stakeholder terkait untuk merumuskan hasil konsultasi kebijakan.
- d. Pelaksanaan uji publik yang dilakukan dengan mengundang narasumber dari Satu Data Indonesia
- e. Finalisasi hasil kajian.

7. Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan

a. Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan

Jurnal Kearsipan diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan serta mendapatkan masukan terkait kebijakan yang telah maupun akan disusun. Tahun 2022 jurnal kearsipan diterbitkan 1 volume yaitu volume 17 dengan masing masing 2(dua) terbitan.

b. Diseminasi Jurnal Kearsipan

Diseminasi merupakan penyebarluasan ide maupun gagasan yang dalam hal ini adalah terkait dengan jurnal kearsipan. Pada tahun 2022 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan melaksanakan First International Seminar on Document, Records, and Archives (1st ISDRA) : Digital Transformation dengan mengundang narasumber :

- a. Prof. Edy Tri Baskoro : Institut Teknologi Bandung
- b. Muhammad Ali : Associate Professor University of California Riverside
- c. Mu'rim Sirry : Associate Professor University of Notre Dame
- d. Prof. Ir. Teddy Mantoro, Ph.D.SMIEE; Universitas Sampoerna
- e. Prof. Dr. Hoga Saragih, ST, MT, IPM, CIRR : Universitas Bakrie
- f. Carolien Stolte : Editor In Chief Itenario: Journal of Global and Imperial Interactions, Associate Professor University of Leiden)

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Terkait dengan pelaksanaan kinerja tahun 2023 di Lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan dapat di simpulkan:

- 1). Pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan telah dilaksanakan dengan baik;
- 2). Capaian realisasi anggaran di lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan adalah sebesar 98,45% sementara capaian realisasi fisik sebesar 95%
- 3). Hasil pengukuran indeks kualitas kebijakan (IKK) yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara terhadap pelaksanaan kebijakan di Arsip Nasional Republik Indonesia adalah sebesar 78,96 % dengan kategor baik.

4.2 Saran

Berdasarkan data hasil kinerja yang dilaksanakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan, setidaknya ada 2 (dua) hal yang perlu untuk ditingkatkan pada tahun selanjutnya yaitu:

1. Perlunya peningkatan kualitas penyusunan rencana program dan kegiatan serta anggaran melalui koordinasi dengan unit kerja terkait untuk mencegah blokir anggaran; dan
2. Peningkatan peran serta sumber daya manusia sebagai stakeholder di Arsip Nasional RI dalam hal penyusunan kebijakan perlu untuk dilaksanakan, mengingat terbatasnya sumber daya manusia yang ada di lingkungan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan.

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Sistem Kearsipan



Muhammad Sumitro

Lampiran-lampiran :

LAMPIRAN Rencana Aksi 2023

RENCANA AKSI PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Rincian Output	Target	RENCANA AKSI				Kendala	Tindak Lanjut	Ket
					Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Penyelenggaraan Kearsipan	Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	Indeks Kualitas Kebijakan	75 indeks	identifikasi populasi kebijakan	pengumpulan bukti dukung regulasi kebijakan	Analisa dan penilaitan mandiri	Finalisasi plenu penilaian indeks kualitas kebijakan			
2	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau dianggarkan	6 Rekomendasi Kebijakan							
			1. Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan	Penyusunan desain kebijakan	1 Konsultasi Kebijakan	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan	Uji Publik dan Finalisasi				
			2. Penyusunan Kebijakan Pemrosesan Media Sosial	Penyusunan desain kebijakan	1 Konsultasi Kebijakan	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan	Uji Publik dan Finalisasi				
			3. Penyusunan Kebijakan Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan	Penyusunan desain kebijakan	1 Konsultasi Kebijakan	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan	Uji Publik dan Finalisasi				
			4. Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip K/L yang Pindah Ibukota Nusantara	Penyusunan desain kebijakan	1 Konsultasi Kebijakan	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan	Uji Publik dan Finalisasi				
			5. Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	Penyusunan desain kebijakan	1 Konsultasi Kebijakan	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan	Uji Publik dan Finalisasi				
			6. Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan	1 Rapat Redaksi	1 Penilaian Artikel Jurnal	1 Rapat Redaksi	1 Penilaian Artikel Jurnal				
				2 Registrasi DOI (Digital Object Identifier)		2 Penilaian Artikel Jurnal	2 Sosialisasi Jurnal Kearsipan				
				3 Integrasi dengan OJS		3 Studi banding dan sosial	3 Seminar Internasional Jurnal Kearsipan				
				4 Penilaian Artikel Jurnal			4 Pembahasan Hasil				
				5 Rapat Persiapan Diseminasi Jurnal			5 Penyebarluasan				
							6 Rapat Evaluasi dan Pelaporan				

Jakarta, 2 Maret 2023

Kepala Pusat

Pengkajian dan Pemoebangan Sistem Kearsipan

Dr. Muhammad Sumitro, S.H., MAP

PK Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Sumitro, SH. MAP

Jabatan : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Dr. Andi Kasman, S.E., MM

Jabatan : Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Andi Kasman, S.E., MM

Jakarta, 26 Desember 2022
Pihak Pertama,

Dr. Muhammad Sumitro, SH. MAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN


No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan kualitas kebijakan kearsipan	1. Indeks Kualitas Kebijakan	75 Indeks
2.	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	2. Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau digunakan	6 Rekomendasi

Kegiatan

Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional

Anggaran

Rp1.516.773.000

Jakarta, 26 Desember 2022
Deputi
Bidang Informasi dan Pengembangan
Sistem Kearsipan,

Dr. Andi Kasman, S.E., MM

Jakarta, 26 Desember 2022
Kepala Pusat
Pengkajian dan Pengembangan
Sistem Kearsipan,

Dr. Muhammad Sumitro, SH. MAP

PK Revisi Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 Revisi Ke-1

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Muhammad Sumitro, SH. MAP

Jabatan : Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Andi Kasman, S.E., MM


Jabatan : Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 November 2023

Pihak Kedua,

Dr. Andi Kasman, S.E., MM

Pihak Pertama,

Dr. Muhammad Sumitro, SH. MAP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

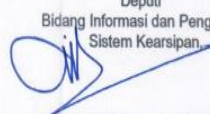
No	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas Kebijakan Kearsipan	1. Indeks Kualitas Kebijakan	75 Indeks
2.	Meningkatnya Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional	2. Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau digunakan	6 Rekomendasi

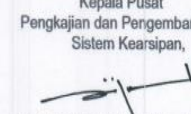
Kegiatan

Anggaran

Pengkajian dan Pengembangan
Sistem Kearsipan Nasional

Rp 735.602.000,00

Deputi
Bidang Informasi dan Pengembangan
Sistem Kearsipan

Dr. Andi Kasman, S.E., MM

Jakarta, 01 November 2023
Kepala Pusat
Pengkajian dan Pengembangan
Sistem Kearsipan,

Dr. Muhammad Sumitro, SH. MAP

LAMPIRAN
RENCANA PENARIKAN DANA PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
KEARSIPAN TAHUN 2023

RENCANA PENARIKAN DANA															
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8	Column9	Column10	Column11	Column12	Column13	Column14	Column15	Column16
KODE	Uraian RO/Komponen/Akun/Detail	JAN	FEB	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL	KET (AUTOMATIC ADJUSTMENT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
087. CN	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional														
3629	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan														
3629.ABL	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan														
3629.ABL.001	Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan														
051	Penyusunan Kebijakan Kearsipan														
A	Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan														
521211	<u>Belanja Bahan</u>														
	Penyusunan Desain Kebijakan														
	- Konsumsi Rapat		1.952.940	1.500.000	2.997.060	1.112.600		2.937.400							
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan														
	- Konsumsi Rapat								1.875.000	7.500.000					
	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan														
	-Konsumsi Rapat										1.875.000				
	Pelaksanaan Uji Publik														
	-Konsumsi Rapat											4.500.000			
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>														
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan							1.800.000							
	Uji Publik												3.400.000		
524.111	<u>Belanja perjalanan biasa</u>														
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan								31.484.000						
524.114	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</u>														
	-Rapat Fullboard									74.316.000	71.922.000				AA
		0	1.952.940	1.500.000	2.997.060	1.112.600	1.800.000	34.421.400	1.875.000	81.816.000	73.797.000	7.900.000	0	209.172.000	

B	Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial														
521211	Belanja Bahan														
	Penyusunan Desain Kebijakan														
	-Konsumsi Rapat		1.875.000	1.350.000											
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan														
	-Konsumsi Rapat						1.500.000	1.500.000							
	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan														
	-Konsumsi Rapat									1.500.000					
	Uji Publik														
	-Konsumsi Rapat										2.050.000				
522151	Belanja Jasa Profesi														
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan							6.800.000							
	Pelaksanaan Uji Publik										3.400.000				
524.111	Belanja perjalanan biasa														
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan										96.392.000				AA
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota														
	-Transportasi Lokal									1.350.000					
524.114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota														
	-Paket Fullboard Meeting						67.848.000								
		0	1.875.000	1.350.000	0	0	67.848.000	1.500.000	8.300.000	2.850.000	96.392.000	5.450.000	0	185.565.000	

C	Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan																
521211	Belanja Bahan																
	Penyusunan Desain Kebijakan																
	- Konsumsi Rapat		1.425.000		1.500.000												
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan																
	- Konsumsi Rapat							308.000	1.500.000	3.000.000							
	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan																
	- Konsumsi Rapat										2.692.000						
	Uji Publik																
	- Konsumsi Rapat											1.875.000					
522151	Belanja Jasa Profesi																
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan									5.400.000			3.400.000				
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa																
	-Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan							39.385.000				59.406.000					AA
524.113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota																
	-Transportasi Lokal										3.150.000						
524.114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota																
	-Paket Fullboard Meeting											71.922.000					AA
		0	1.425.000	0	1.500.000	0	308.000	40.885.000	8.400.000	5.842.000	131.328.000	5.275.000	0	194.963.000			
D	Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang pindah Ibukota Nusantara																
521211	Belanja Bahan																
	Penyusunan Desain Kebijakan																
	- Konsumsi Rapat			1.500.000	1.500.000												
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan																
	- Konsumsi Rapat					1.189.503		1.810.497		6.000.000							
	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan																
	- Konsumsi Rapat										1.500.000	1.500.000					
	Uji Publik																
	- Konsumsi Rapat												2.164.000				
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri																
	-Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan											261.310.000					AA
522131	Belanja Jasa Konsultan																
	-Konsultasi Kebijakan											100.000.000					AA
522151	Belanja Jasa Profesi																
	Konsultasi Kebijakan									6.800.000							
	Uji Publik												3.400.000				
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota																
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan											47.796.000					
		0	0	1.500.000	1.500.000	1.189.503	0	1.810.497	0	14.300.000	410.606.000	5.564.000	0	436.470.000			

E Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan														
521211	Belanja Bahan													
	Penyusunan Desain Kajian/Penelitian													
	-Konsumsi Rapat			3.000.000										
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan													
	-Konsumsi Rapat						1.500.000	1.500.000	1.500.000					
	Pembahasan Hasil Konsultasi Kebijakan													
	-Konsumsi Rapat									3.000.000				
	Uji Publik													
	-Konsumsi Rapat			1.500.000									2.250.000	
522151	Belanja Jasa Profesi													
	Konsultasi Kebijakan							6.800.000						
	Uji Publik												3.400.000	
524111	Belanja perjalanan biasa													
	Konsultasi Kebijakan		19.040.000				23.586.000							
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota													
	Pelaksanaan Konsultasi Kebijakan												59.180.000	
		0	19.040.000	4.500.000	0	0	23.586.000	1.500.000	8.300.000	1.500.000	3.000.000	64.830.000	0	126.256.000
052	Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan													
A	Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan													
521211	Belanja Bahan													
	- Rapat Redaksi	1.470.000						1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.530.000			
521213	Honor Output Kegiatan													
	-Honor Output Kegiatan												50.800.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya													
	-Digital Object Identifier									2.500.000				
522151	Belanja Jasa Profesi													
	-Mitra Bestari												15.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota													
	-Pembahasan Penerbitan Jurnal Kearsipan												71.232.000	
B	Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan													
521211	Belanja Bahan													
	-Konsumsi Rapat					900.000	1.401.400		3.000.000	3.000.000	44.496.000	2.198.600		
	-Pencetakan												12.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi													
	-Workshop Penulisan Jurnal									10.200.000				
	Seminar Internasional Jurnal Kearsipan											13.600.000		
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota													
	-Transport Lokal								1.800.000					
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota													
	Pembahasan Hasil Diseminasi	1.470.000	0	0	0	900.000	1.401.400	1.500.000	6.300.000	17.200.000	179.845.000	73.430.600	77.800.000	359.847.000
Total		1.470.000	24.292.940	8.850.000	5.997.060	3.202.103	94.943.400	81.616.897	33.175.000	123.508.000	894.968.000	162.449.600	77.800.000	1.512.273.000

Laporan Capaian Realisasi Anggaran per Triwulan

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Oktober 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	735,602,000	0	217,012,247	213,798,000	430,810,247	58.57 %	304,791,753
CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	735,602,000	0	217,012,247	213,798,000	430,810,247	58.57 %	304,791,753
CN.3629 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	735,602,000	0	217,012,247	213,798,000	430,810,247	58.57 %	304,791,753
ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	735,602,000	0	217,012,247	213,798,000	430,810,247	58.57 %	304,791,753
ABL.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan	735,602,000	0	217,012,247	213,798,000	430,810,247	58.57 %	304,791,753
051 Penyusunan Kebijakan Kearsipan	494,811,000	0	213,240,847	105,416,000	318,656,847	64.40 %	176,154,153
051.0A Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan	124,088,000	0	40,987,920	74,316,000	115,303,920	92.92 %	8,784,080
521211 Belanja Bahan	15,812,000	0	9,048,660	0	9,048,660	57.23 %	6,763,340
002048. Konsumsi Rapat	3,000,000	0	2,986,060	0	2,986,060	99.54 %	13,940
002050. Konsumsi rapat FGD	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00 %	0
002052. Konsumsi Rapat	1,012,000	0	0	0	0	0.00 %	1,012,000
006189. Konsumsi Rapat	7,500,000	0	4,562,600	0	4,562,600	60.83 %	2,937,400
006190. Konsumsi rapat FGD	550,000	0	0	0	0	0.00 %	550,000
006191. Konsumsi Rapat	2,250,000	0	0	0	0	0.00 %	2,250,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	47.37 %	2,000,000
002057. Narasumber Eseton III	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00 %	0
002060. Narasumber Es II	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,160,000	0	30,139,260	0	30,139,260	99.93 %	20,740
002066. Tiket Aceh	15,300,000	0	15,281,760	0	15,281,760	99.88 %	18,240
002067. Penginapan Aceh	7,392,000	0	7,392,000	0	7,392,000	100.00 %	0
002069. Uang Harian Aceh	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000	100.00 %	0
002070. Uang Transportasi Jakarta - Aceh	1,708,000	0	1,705,500	0	1,705,500	99.85 %	2,500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	74,316,000	0	0	74,316,000	74,316,000	100.00 %	0
006193. Paket Fullboard Rapat Es I dan II Kebijakan Arsitektur SPBE	5,388,000	0	0	5,388,000	5,388,000	100.00 %	0
006194. Paket Fullboard Rapat Kebijakan Arsitektur SPBE	52,668,000	0	0	52,668,000	52,668,000	100.00 %	0
006195. Uang Harian Fullboard Kebijakan Arsitektur SPBE	12,960,000	0	0	12,960,000	12,960,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Oktober 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 2 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d Periode	%	
006196. Transport Fullboard Kebijakan Arsitektur SPBE	3,300,000	0	0	3,300,000	3,300,000	100.00 %	0
051.0B Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial	86,198,000	0	72,423,000	2,000,000	74,423,000	86.34 %	11,775,000
521211 Belanja Bahan	9,600,000	0	3,225,000	0	3,225,000	33.59 %	6,375,000
002083. Konsumsi Rapat	1,875,000	0	1,875,000	0	1,875,000	100.00 %	0
002085. Konsumsi rapat FGD	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
002087. Konsumsi Rapat	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
002089. Konsumsi Rapat	1,875,000	0	0	0	0	0.00 %	1,875,000
006197. Konsumsi Rapat	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	7,400,000	0	0	2,000,000	2,000,000	27.03 %	5,400,000
002092. Narasumber Es II	4,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	50.00 %	2,000,000
002094. Narasumber Pakar	3,400,000	0	0	0	0	0.00 %	3,400,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00 %	0
002116. Transport Lokal	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67,848,000	0	67,848,000	0	67,848,000	100.00 %	0
002118. Paket Fullboard Rapat Es I dan II Media Sosial	5,388,000	0	5,388,000	0	5,388,000	100.00 %	0
002119. Paket Fullboard Rapat Pengarsipan Media Sosial	47,880,000	0	47,880,000	0	47,880,000	100.00 %	0
002120. Uang Harian Fullboard Pengarsipan Media Sosial	11,880,000	0	11,880,000	0	11,880,000	100.00 %	0
002121. Transport Fullboard Pengarsipan Media Sosial	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00 %	0
051.0C Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan	64,795,000	0	47,367,576	0	47,367,576	73.10 %	17,427,424
521211 Belanja Bahan	9,675,000	0	4,633,000	0	4,633,000	47.89 %	5,042,000
002125. Konsumsi Rapat	3,000,000	0	2,900,000	0	2,900,000	96.67 %	100,000
002127. Konsumsi rapat FGD	3,000,000	0	0	0	0	0.00 %	3,000,000
002129. Konsumsi Rapat	1,800,000	0	1,733,000	0	1,733,000	96.28 %	67,000
002131. Konsumsi Ekspose	1,875,000	0	0	0	0	0.00 %	1,875,000
522151 Belanja Jasa Profesi	12,200,000	0	0	0	0	0.00 %	12,200,000
002134. Narasumber Eseton II	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Oktober 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 3 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002135. Narasumber Pakar	3,400,000	0	0	0	0	0.00 %	3,400,000
002137. Narasumber Pakar	6,800,000	0	0	0	0	0.00 %	6,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,920,000	0	39,734,576	0	39,734,576	99.54 %	185,424
002144. Tiket Es I Kalbar	13,150,000	0	13,113,145	0	13,113,145	99.72 %	36,855
002145. Penginapan Gol IV/ Es I Kalbar	3,150,000	0	3,130,400	0	3,130,400	99.38 %	19,600
002146. Penginapan Gol III Kalbar	2,700,000	0	2,682,000	0	2,682,000	99.33 %	18,000
002147. Uang Harian Kalbar	6,080,000	0	6,080,000	0	6,080,000	100.00 %	0
002148. Uang Transportasi Jakarta - Kalbar	900,000	0	790,131	0	790,131	87.79 %	109,869
006198. Tiket Kalbar	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00 %	0
006199. Penginapan Gol IV/ Es II Kalbar	2,616,000	0	2,614,900	0	2,614,900	99.96 %	1,100
006200. Uang Representasi Es I Kalbar	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00 %	0
006201. Uang Representasi Es II Kalbar	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00 %	0
006202. Transport Darat Pontianak - Sanggau	2,424,000	0	2,424,000	0	2,424,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00 %	0
002152. Transport	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00 %	0
051.DD Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang Pindah Ibukota Nusantara	98,375,000	0	5,689,503	3,000,000	8,689,503	8.83 %	89,685,497
521211 Belanja Bahan	12,375,000	0	5,689,503	3,000,000	8,689,503	70.22 %	3,685,497
002161. Konsumsi Rapat	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00 %	0
002163. Konsumsi rapat	4,500,000	0	2,689,503	0	2,689,503	59.77 %	1,810,497
002165. Konsumsi Rapat	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	100.00 %	0
002167. Konsumsi	1,875,000	0	0	0	0	0.00 %	1,875,000
522151 Belanja Jasa Profesi	8,000,000	0	0	0	0	0.00 %	8,000,000
002171. Narasumber Es II	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
002173. Narasumber Es II	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78,000,000	0	0	0	0	0.00 %	78,000,000
002175. Paket Fullboard Rapat Es I dan II Penataan Arsip KL ke IKN	8,082,000	0	0	0	0	0.00 %	8,082,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Oktober 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 4 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002176. Paket Fullboard Rapat Penataan Arsip KL ke IKN	52,668,000	0	0	0	0	0.00 %	52,668,000
002177. Uang Harian Fullboard Penataan Arsip KL ke IKN	13,500,000	0	0	0	0	0.00 %	13,500,000
002178. Transport Fullboard Penataan Arsip KL ke IKN	3,750,000	0	0	0	0	0.00 %	3,750,000
051.OE Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	121,355,000	0	46,772,848	26,100,000	72,872,848	60.05 %	48,482,152
521211 Belanja Bahan	9,075,000	0	4,500,000	0	4,500,000	49.59 %	4,575,000
002187. Konsumsi Rapat	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00 %	0
002189. Konsumsi rapat	1,575,000	0	0	0	0	0.00 %	1,575,000
002191. Konsumsi Rapat	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
002193. Konsumsi Rapat	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00 %	0
007280. Konsumsi Rapat	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
522151 Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	0	5,400,000	5,400,000	50.00 %	5,400,000
002196. Narasumber Pakar	6,800,000	0	0	5,400,000	5,400,000	79.41 %	1,400,000
008010. Narasumber Es II	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
008013. Narasumber Es II	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,300,000	0	42,272,848	0	42,272,848	99.94 %	27,152
002199. Uang Harian Malang	6,560,000	0	6,560,000	0	6,560,000	100.00 %	0
002200. Uang Transportasi Jakarta - Malang	672,000	0	671,500	0	671,500	99.93 %	500
002206. Penginapan Gol IV Jawa Tengah	4,414,000	0	4,414,000	0	4,414,000	100.00 %	0
002208. Uang Harian Jawa Tengah	5,920,000	0	5,920,000	0	5,920,000	100.00 %	0
002209. Transportasi Jakarta - Semarang	1,384,000	0	1,384,000	0	1,384,000	100.00 %	0
002211. Tiket Malang	10,000,000	0	9,979,348	0	9,979,348	99.79 %	20,652
002212. Penginapan Malang (2 org 3 hr) dan 30% (2 org 3 hr)	6,354,000	0	6,349,200	0	6,349,200	99.92 %	4,800
006204. Penginapan Gol IV Jawa Tengah	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00 %	0
006205. Penginapan Gol IV/Es I 30% Jawa Tengah	1,273,000	0	1,272,600	0	1,272,600	99.97 %	400
006206. Penginapan Gol IV/Es II 30% Jawa Tengah	555,000	0	555,000	0	555,000	100.00 %	0
006207. Penginapan Gol IV 30% Jawa Tengah	308,000	0	307,200	0	307,200	99.74 %	800

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Oktober 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
 Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 5 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
006208. Penginapan Gol III Jawa Tengah	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
006209. Penginapan Gol III Jawa Tengah	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
006210. Penginapan Gol III 30% Jawa Tengah	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
006211. Transportasi Darat Semarang - Biora	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	100.00	0
006212. Uang Representasi Es I Jawa Tengah	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
006213. Uang Representasi Es II Jawa Tengah	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	59,180,000	0	0	20,700,000	20,700,000	34.98 %	38,480,000
002214. Paket Fullboard Rapat Es I dan II Satu Data Kearsipan	4,400,000	0	0	0	0	0.00 %	4,400,000
002215. Paket Fullboard Rapat Satu Data Kearsipan	32,880,000	0	0	0	0	0.00 %	32,880,000
002216. Uang Harian Fullboard Satu Data Kearsipan	9,900,000	0	0	9,900,000	9,900,000	100.00	0
002217. Transport Fullboard Satu Data Kearsipan	12,000,000	0	0	10,800,000	10,800,000	90.00 %	1,200,000
052 Penyelenggaraan Jurnal kearsipan	240,791,000	0	3,771,400	108,382,000	112,153,400	46.58 %	128,637,600
052.0A Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan	144,932,000	0	1,470,000	73,732,000	75,202,000	51.89 %	69,730,000
521211 Belanja Bahan	7,500,000	0	1,470,000	0	1,470,000	19.60 %	6,030,000
002218. Rapat Redaksi	7,500,000	0	1,470,000	0	1,470,000	19.60 %	6,030,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	48,700,000	0	0	0	0	0.00 %	48,700,000
002219. Penanggung Jawab	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
002220. Redaktur	800,000	0	0	0	0	0.00 %	800,000
002223. Penyunting/Editor	5,400,000	0	0	0	0	0.00 %	5,400,000
002224. Sekretariat	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
002225. Pembustan Artikel	40,000,000	0	0	0	0	0.00 %	40,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	100.00	0
002226. DOI (Digital Object Identifier)	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
002227. Mitra Bestari	15,000,000	0	0	0	0	0.00 %	15,000,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71,232,000	0	0	71,232,000	71,232,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Oktober 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
 Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 6 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
006215. Paket Fullboard Rapat Es I dan II Penerbitan Jurnal Kearsipan	5,388,000	0	0	5,388,000	5,388,000	100.00	0
006216. Paket Fullboard Rapat Penerbitan Jurnal Kearsipan	50,274,000	0	0	50,274,000	50,274,000	100.00	0
006217. Uang Harian Fullboard Penerbitan Jurnal Kearsipan	12,420,000	0	0	12,420,000	12,420,000	100.00	0
006218. Transport Fullboard Penerbitan Jurnal Kearsipan	3,150,000	0	0	3,150,000	3,150,000	100.00	0
052.0B Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan	95,859,000	0	2,301,400	34,650,000	36,951,400	38.55 %	58,907,600
521211 Belanja Bahan	70,259,000	0	2,301,400	34,650,000	36,951,400	52.59 %	33,307,600
002234. Konsumsi Rapat	9,000,000	0	2,301,400	1,950,000	4,251,400	47.24 %	4,748,600
002235. Penggandaan	659,000	0	0	0	0	0.00 %	659,000
002237. Pencetakan	12,000,000	0	0	0	0	0.00 %	12,000,000
006219. Konsumsi Rapat	15,900,000	0	0	0	0	0.00 %	15,900,000
006220. Seminar Kit	32,700,000	0	0	32,700,000	32,700,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	23,800,000	0	0	0	0	0.00 %	23,800,000
002239. Narasumber Pakar Seminar Internasional	13,600,000	0	0	0	0	0.00 %	13,600,000
006222. Narasumber Pakar Workshop	10,200,000	0	0	0	0	0.00 %	10,200,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
006224. Transport Koordinasi Akreditasi Jurnal Kearsipan	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

CN.3629	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	735,602,000	0	430,810,247	176,580,500	607,390,747	82.57 %	128,211,253
	ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	735,602,000	0	430,810,247	176,580,500	607,390,747	82.57 %	128,211,253
	ABL.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan	735,602,000	0	430,810,247	176,580,500	607,390,747	82.57 %	128,211,253
	051 Penyusunan Kebijakan Kearsipan	494,811,000	0	318,656,847	131,880,500	450,537,347	91.05 %	44,273,653
	051.0A Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan	124,088,000	0	115,303,920	0	115,303,920	92.92 %	8,784,080

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

051.0D	Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang Pindah Ibukota Nusantara	98,375,000	0	8,689,503	80,950,000	89,639,503	91.12 %	8,735,497
521211	Belanja Bahan	12,375,000	0	8,689,503	0	8,689,503	70.22 %	3,685,497
522151	Belanja Jasa Profesi	8,000,000	0	0	3,400,000	3,400,000	42.50 %	4,600,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78,000,000	0	0	77,550,000	77,550,000	99.42 %	450,000
051.0E	Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	121,355,000	0	72,872,848	39,955,500	112,828,348	92.97 %	8,526,652
521211	Belanja Bahan	9,075,000	0	4,500,000	1,500,000	6,000,000	66.12 %	3,075,000
522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	5,400,000	0	5,400,000	50.00 %	5,400,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,300,000	0	42,272,848	0	42,272,848	99.94 %	27,152
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	59,180,000	0	20,700,000	38,455,500	59,155,500	99.96 %	24,500
052	Penyelenggaraan Jurnal kearsipan	240,791,000	0	112,153,400	44,700,000	156,853,400	65.14 %	83,937,600
052.0A	Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan	144,932,000	0	75,202,000	11,200,000	86,402,000	59.62 %	58,530,000
521211	Belanja Bahan	7,500,000	0	1,470,000	0	1,470,000	19.60 %	6,030,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode November 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 33 dari 82

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	15,812,000	0	9,048,660	0	9,048,660	57.23 %	6,763,340
522151 Belanja Jasa Profesi	3,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	47.37 %	2,000,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30,160,000	0	30,139,260	0	30,139,260	99.93 %	20,740
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	74,316,000	0	74,316,000	0	74,316,000	100.00 %	0
051.0B Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial	86,198,000	0	74,423,000	3,575,000	77,998,000	90.49 %	8,200,000
521211 Belanja Bahan	9,600,000	0	3,225,000	1,575,000	4,800,000	50.00 %	4,800,000
522151 Belanja Jasa Profesi	7,400,000	0	2,000,000	2,000,000	4,000,000	54.05 %	3,400,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67,848,000	0	67,848,000	0	67,848,000	100.00 %	0
051.0C Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan	64,795,000	0	47,367,576	7,400,000	54,767,576	84.52 %	10,027,424
521211 Belanja Bahan	9,675,000	0	4,633,000	0	4,633,000	47.89 %	5,042,000
522151 Belanja Jasa Profesi	12,200,000	0	0	7,400,000	7,400,000	60.66 %	4,800,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,920,000	0	39,734,576	0	39,734,576	99.54 %	185,424
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00 %	0

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode November 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 34 dari 82

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	48,700,000	0	0	3,700,000	3,700,000	7.60 %	45,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	15,000,000	0	0	7,500,000	7,500,000	50.00 %	7,500,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71,232,000	0	71,232,000	0	71,232,000	100.00 %	0
052.0B Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan	95,859,000	0	36,951,400	33,500,000	70,451,400	73.49 %	25,407,600
521211 Belanja Bahan	70,259,000	0	36,951,400	15,900,000	52,851,400	75.22 %	17,407,600

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode November 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 34 dari 82

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	48,700,000	0	0	3,700,000	3,700,000	7.60 %	45,000,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	15,000,000	0	0	7,500,000	7,500,000	50.00 %	7,500,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71,232,000	0	71,232,000	0	71,232,000	100.00 %	0
052.0B Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan	95,859,000	0	36,951,400	33,500,000	70,451,400	73.49 %	25,407,600
521211 Belanja Bahan	70,259,000	0	36,951,400	15,900,000	52,851,400	75.22 %	17,407,600
522151 Belanja Jasa Profesi	23,800,000	0	0	15,800,000	15,800,000	66.39 %	8,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00 %	0

CN.3629	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	735,602,000	0	537,340,747	186,860,000	724,200,747	98.45 %	11,401,253
ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan		735,602,000	0	537,340,747	186,860,000	724,200,747	98.45 %	11,401,253
ABL.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan		735,602,000	0	537,340,747	186,860,000	724,200,747	98.45 %	11,401,253
051 Penyusunan Kebijakan Kearsipan		494,811,000	0	399,787,347	102,936,400	492,723,747	99.58 %	2,087,253
051.0A Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan		124,088,000	0	115,303,920	7,900,903	123,204,823	99.29 %	883,177
521211 Belanja Bahan		15,812,000	0	9,048,660	5,900,903	14,949,563	94.55 %	862,437
522151 Belanja Jasa Profesi		3,800,000	0	1,800,000	2,000,000	3,800,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa		30,160,000	0	30,139,260	0	30,139,260	99.93 %	20,740
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		74,316,000	0	74,316,000	0	74,316,000	100.00 %	0
051.0B Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial		86,198,000	0	77,998,000	8,200,000	86,198,000	100.00 %	0
521211 Belanja Bahan		9,600,000	0	4,800,000	4,800,000	9,600,000	100.00 %	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 34 dari 84

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522151 Belanja Jasa Profesi	7,400,000	0	4,000,000	3,400,000	7,400,000	100.00 %	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67,848,000	0	67,848,000	0	67,848,000	100.00 %	0
051.0C Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan	64,795,000	0	54,767,576	9,800,000	64,367,576	99.34 %	427,424
521211 Belanja Bahan	9,675,000	0	4,633,000	4,800,000	9,433,000	97.50 %	242,000
522151 Belanja Jasa Profesi	12,200,000	0	7,400,000	4,800,000	12,200,000	100.00 %	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39,920,000	0	39,734,576	0	39,734,576	99.54 %	185,424

052 Penyelenggaraan jurnal kearsipan	240,791,000	0	147,553,400	83,923,600	231,477,000	96.13 %	9,314,000
052.0A Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan	144,932,000	0	82,702,000	60,930,000	143,632,000	99.10 %	1,300,000
521211 Belanja Bahan	7,500,000	0	1,470,000	6,030,000	7,500,000	100.00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	48,700,000	0	0	47,400,000	47,400,000	97.33 %	1,300,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	15,000,000	0	7,500,000	7,500,000	15,000,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71,232,000	0	71,232,000	0	71,232,000	100.00 %	0
052.0B Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan	95,859,000	0	64,851,400	22,993,600	87,845,000	91.64 %	8,014,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 35 dari 84

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	70,259,000	0	52,851,400	17,393,600	70,245,000	99.98 %	14,000
522151 Belanja Jasa Profesi	23,800,000	0	10,200,000	5,600,000	15,800,000	66.39 %	8,000,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00 %	0

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00 %	0
051.0D Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip-KL yang Pindah Itsukota Nusantara	98,375,000	0	28,889,503	69,035,497	97,925,000	99.54 %	450,000
521211 Belanja Bahan	12,375,000	0	8,689,503	3,685,497	12,375,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	8,000,000	0	3,400,000	4,600,000	8,000,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	78,000,000	0	16,800,000	60,750,000	77,550,000	99.42 %	450,000
051.0E Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	121,355,000	0	112,828,348	8,200,000	121,028,348	99.73 %	326,652
521211 Belanja Bahan	9,075,000	0	6,000,000	3,000,000	9,000,000	99.17 %	75,000
522151 Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	5,400,000	5,200,000	10,800,000	98.15 %	200,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,300,000	0	42,272,848	0	42,272,848	99.94 %	27,152
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	59,180,000	0	59,155,500	0	59,155,500	99.96 %	24,500
052 Penyelenggaraan jurnal kearsipan	240,791,000	0	147,553,400	83,923,600	231,477,000	96.13 %	9,314,000
052.0A Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan	144,932,000	0	82,702,000	60,930,000	143,632,000	99.10 %	1,300,000
521211 Belanja Bahan	7,500,000	0	1,470,000	6,030,000	7,500,000	100.00 %	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	48,700,000	0	0	47,400,000	47,400,000	97.33 %	1,300,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00 %	0
522151 Belanja Jasa Profesi	15,000,000	0	7,500,000	7,500,000	15,000,000	100.00 %	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	71,232,000	0	71,232,000	0	71,232,000	100.00 %	0
052.0B Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan	95,859,000	0	64,851,400	22,993,600	87,845,000	91.64 %	8,014,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;
Periode Desember 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Hal 35 dari 84

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	70,259,000	0	52,851,400	17,393,600	70,245,000	99.98 %	14,000

LAPORAN CAPAIAN FISIK (Oktober s.d Desember 2023

PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (CAPAIAN OUTPUT)

Periode Oktober 2023

Kementerian : 057 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Uraian	PAGU REVISI (tanpa biakir)	REALISASI KEUANGAN (NON-KUMULATIF)				SISA ANGGARAN	TARGET OUTPUT	REALISASI FISIK/CAPAIAN OUTPUT (NON-KUMULATIF)				Hambatan Pelaksanaan	Tindak Lanjut Hambatan	
		S.D September		PERIODE OKTOBER				S.D September		OKTOBER				
		(Rp).-	%	(Rp).-	%			Volume Capaian	Progres %	Volume Capaian	Progres %			
01N.0029 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	735.602.000	217.012.247	29,55 %	213.798.000	29,06 %	304.791.753	6 Rekomendasi Kebijakan	4	79%	0	10,00 %			
ADL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	735.602.000	217.012.247	29,50 %	213.798.000	29,06 %	304.791.753	6 Rekomendasi Kebijakan	4	79%	0	10,00 %			
ADL.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan	735.602.000	217.012.247	29,50 %	213.798.000	29,06 %	304.791.753	6 Rekomendasi Kebijakan	4	79,9%	0	10,9%			
051 Penyusunan Kajian Kearsipan	490.434.000	213.240.547	43,48 %	105.416.000	21,49 %	171.777.153								
051.A Penyusunan Kebijakan Analitik SPBE Bidang Kearsipan	135.926.000	40.987.920	30,15 %	74.316.000	54,67 %	20.622.080						penyusunan rekomendasi kebijakan yang meliputi berbagai komponen sebagaimana dimanakan oleh perpes	koordinasi dengan tim kerja	
051.B Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial	86.173.000	72.423.000	81,22 %	2.000.000	2,34 %	14.750.000						Telah dilaksanakan kegiatan FGD dalam rangka konsultasi rekomendasi kebijakan	sesuai dengan rencana yang dilaksanakan	
051.C Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan	64.245.000	47.367.576	73,73 %	0	0,00 %	16.877.424						Telah dilaksanakan kegiatan FGD dalam rangka konsultasi rekomendasi kebijakan	pelaksanaan validasi data responden dalam penyusunan rekomendasi kebijakan	koordinasi dengan tim kerja
051.D Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang Pindah Bukota Nusantara	75.160.000	5.699.503	7,57 %	3.000.000	3,99 %	60.470.497						Telah dilaksanakan kegiatan FGD dalam rangka konsultasi rekomendasi kebijakan	perencanaan strategi sesuai dengan data arsip yang dihasilkan Kementerian	koordinasi dengan tim percepatan Direktorat Kearsipan Daerah
051.E Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	125.930.000	46.772.848	37,14 %	26.100.000	20,73 %	53.057.152						Telah dilaksanakan kegiatan FGD dalam rangka konsultasi rekomendasi kebijakan	sudah ada kerja terkait dengan satu data dan aplikasi sidata	pelaksanaan analisa sesuai dengan fakta lapangan
052 Penyelenggaraan Jurnal kearsipan	245.168.000	3.771.400	1,54 %	108.382.000	44,21 %	133.014.600								
052.A Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan	147.032.000	1.470.000	1,00 %	73.732.000	50,15 %	71.830.000						Telah dilaksanakan kegiatan pembahasan penerbitan jurnal kearsipan tahun 2023	Open Journal terkait dengan	koordinasi dengan Puadain
052.B Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan	98.136.000	2.301.400	2,35 %	34.650.000	35,31 %	61.184.600						Telah dilaksanakan kegiatan seminar internasional 2nd ISDRA	perlu diikuti dengan workshop untuk penulis	koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit yang terkait

PUSAT PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (CAPAIAN OUTPUT)

Periode November 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL

Satuan Kerja : 460448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Uraian	PAGU REVISI (tanpa blokir)	REALISASI KEUANGAN (NON-KUMULATIF)				SISA ANGGARAN	TARGET OUTPUT	REALISASI FISIK/CAPAIAN OUTPUT (NON-KUMULATIF)				Hambatan Pelaksanaan	Tindak Lanjut Hambatan
		S.D Oktober		PERIODE November				S.D Oktober		PERIODE November			
		(Rp).-	%	(Rp).-	%			Volume Capaian	Progres %	Volume Capaian	Progres %		
CN.029 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	735.602.000	430.810.247	58,57 %	176.580.500	24,00 %	128.211.253							
ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	735.602.000	430.810.247	58,57 %	176.580.500	24,00 %	128.211.253	0 Rekomendasi Kebijakan	4	80%	0	10,00 %		
ABL.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan	735.602.000	430.810.247	58,57 %	176.580.500	24,00 %	128.211.253	0 Rekomendasi Kebijakan	4	80,00%	0	0,00%		
051 Penyusunan Kajian Kearsipan	494.811.000	318.656.847	64,40 %	131.880.500	26,65 %	44.273.653							
051.A Penyusunan Kebijakan Asitektur SPBE Bidang Kearsipan	124.088.000	115.303.920	92,92 %	0	0,00 %	8.784.080							
051.B Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial	86.198.000	74.423.000	86,34 %	3.575.000	4,15 %	8.200.000							
051.C Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan	64.795.000	47.367.576	73,10 %	7.400.000	11,42 %	10.027.424							
051.D Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang Pindah Bukota Nusantara	98.375.000	8.689.503	8,83 %	80.950.000	82,29 %	8.735.467							
051.E Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	121.355.000	72.872.848	60,05 %	39.955.500	32,92 %	8.526.652							
052 Penyelenggaraan Jurnal Kearsipan	240.791.000	112.153.400	46,58 %	44.700.000	18,56 %	83.937.600							
052.A Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan	144.932.000	75.202.000	51,89 %	11.200.000	7,73 %	58.530.000							
052.B Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan	95.859.000	36.951.400	38,55 %	33.500.000	34,95 %	25.407.600							

PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK (CAPAIAN OUTPUT)

Periode Desember 2023

Kementerian : 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 Unit Organisasi : 01 ARSIP NASIONAL
 Satuan Kerja : 450448 ARSIP NASIONAL R I JAKARTA

Uraian	PAGU REVISI (tanpa blokir)	REALISASI KEUANGAN (NON-KUMULATIF)				SISA ANGGARAN	TARGET OUTPUT	REALISASI FISIK/CAPAIAN OUTPUT (NON-KUMULATIF)				Hambatan Pelaksanaan
		S.D November		PERIODE Desember				S.D November		PERIODE Desember		
		(Rp).-	%	(Rp).-	%			Volume Capaian	Progres %	Volume Capaian	Progres %	
CN.3629 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan	735.602.000	607.390.747	82,57 %	116.810.000	15,88 %	11.401.253						
ABL Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan	735.602.000	607.390.747	82,57 %	116.810.000	15,88 %	11.401.253	6 Rekomendasi Kebijakan	4	90%	0	10,00 %	
ABL.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan	735.602.000	607.390.747	82,57 %	116.810.000	15,88 %	11.401.253	6 Rekomendasi Kebijakan	4	90,00%	0	0,00%	
051 Penyusunan Kajian Kearsipan	494.811.000	450.537.347	91,05 %	42.186.400	8,53 %	2.087.253						
051.A Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan	124.088.000	115.303.920	92,92 %	7.900.903	6,37 %	883.177						1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian
051.B Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial	86.198.000	77.998.000	90,49 %	8.200.000	9,51 %	0						1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian
051.C Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan	64.795.000	54.767.576	84,52 %	9.600.000	14,82 %	427.424						1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian
051.D Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang Pindah Ibukota Nusantara	98.375.000	89.639.503	91,12 %	8.285.497	8,42 %	450.000						1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian
051.E Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	121.355.000	112.828.348	92,97 %	8.200.000	6,76 %	326.652						1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian
052 Penyelenggaraan jurnal kearsipan	240.791.000	156.853.400	65,14 %	74.623.600	30,99 %	9.314.000						
052.A Penyelenggaraan Penerbitan Jurnal Kearsipan	144.932.000	86.402.000	59,62 %	57.230.000	39,49 %	1.300.000						1. Kesulitan Koordinasi dengan narasumber terkait penyesuaian
052.B Penyelenggaraan Diseminasi Jurnal Kearsipan	95.859.000	70.451.400	73,49 %	17.393.600	18,14 %	8.014.000						Adanya perubahan proses kerja editor agar tidak tumpang tindih

REKAP PELAPORAN KOMPONEN TRIWULAN IV (PARSIAL)

Tahun : 2023

K/L : 087 - ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UK. Eselon I : 01 - Arsip Nasional

UK. Eselon II : 15 - Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	STATUS PELAKSANAAN			FISIK			FISIK Riil	ANGGARAN			Status Kemanfaatan	PERMASALAHAN	
		Status	Keterangan	Progres	Satuan	Vol.	Real.		Alokasi	Real.	%		Kategori	Keterangan
3629.ABL.001 - Rekomendasi Kebijakan Bidang Kearsipan														
1	051 Penyusunan Kebijakan Kearsipan	Pelaksanaan	1. Uji Publik Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Bidang Kearsipan 2. Uji Publik Penyusunan Kebijakan Pengarsipan Media Sosial 3. Penyusunan Draft Efektivitas Kebijakan Dalam Rangka Transformasi Digital Kearsipan BAB 4 4. Uji Publik Penyusunan Kebijakan Percepatan Penataan Arsip KL yang Pindah Ibukota Nusantara 5. Uji Publik Penyusunan Kebijakan Satu Data Kearsipan	98.00	Kebijakan Kearsipan	6	5		494,811,000	279,482,900	56.48%	Belum	Waktu	"1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian waktu. 2. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Kurang" "1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian waktu. 2. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Kurang" "1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian waktu. 2. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Kurang" "1. Kesulitan Koordinator dengan narasumber terkait penyesuaian waktu. 2. Kapasitas dan Kompetensi SDM yang Kurang"
2	052 Penyelenggaraan jurnal kearsipan	Pelaksanaan	1. Melakukan review naskah dan pencetakan naskah jurnal kearsipan 2. kegiatan Diseminasi Jurnal	98.00	Volume jurnal	2	1		240,791,000	227,705,600	94.57%	Belum	Waktu	"1. Kesulitan Koordinasi dengan narasumber terkait penyesuaian waktu 2. Kesulitan mencari Narasumber " 3. Adanya perubahan proses kerja editor agar tidak tumpang tindih dengan mitra bestari

LEMBAR PENGESAHAN

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan

[masih kosong]
